

BALÁZS KÁNTÁS

PERANGKAT POS
INDEPENDEN NEGARA
PAHANG MALAYSIA
1889–1941



Penyusun katalog perangkat elektronik:

Dr. Balázs Kántás PhD

ISBN 978-615-7015-12-8

Penerbit yang bertanggung jawab:

Dr. Zoltán Zsávolya PhD

HUNGARICA ELECTRONICA
BUDAPEST, 2025

GARIS BESAR SEJARAH DAN FILATELI NEGARA PAHANG DARI AWAL TAHUN 1800-AN SAMPAI AKHIR PERANG DUNIA II

Pahang saat ini adalah provinsi terbesar ketiga di Malaysia, yang terletak di bagian tengah Semenanjung Malaya. Luasnya 35.964 km², dengan populasi 1,5 juta jiwa. Namun, pada awal abad ke-19, Pahang adalah salah satu kerajaan besar dan kaya di pantai timur Semenanjung Malaya, tetapi sangat terpecah belah secara internal. Negara ini berkembang sebagai warisan Kesultanan Johor, tetapi kekuasaan pusat tetap lemah, dan para kepala suku lokal, panglima perang, bangsawan, serta berbagai cabang keluarga kerajaan sering berselisih memperebutkan pengaruh dan kekuasaan politik. Ekonomi negara ini didominasi oleh pertanian

tradisional dan pertambangan emas dan timah, yang produksinya sebagian besar diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan tetangga untuk diperdagangkan secara internasional. Pahang juga kadang-kadang membayar pajak ke Siam, yang menunjukkan bahwa wilayah ini tidak sepenuhnya otonom, tetapi berfungsi sebagai semacam vasal dari negara tetangga yang lebih besar.

Sejak pertengahan abad ke-19, ketidakstabilan politik lokal semakin meningkat. Perselisihan mengenai pewarisan tahta dan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan provinsi sering kali menimbulkan kondisi perang saudara. Perang saudara yang berlangsung antara tahun 1857 dan 1863 memiliki konsekuensi yang sangat serius: campur tangan Temenggong di Johor dan keluarga bangsawan lokal yang bersaing menyebabkan ketidakpastian selama bertahun-tahun dalam kehidupan negara. Pada periode ini, pengaruh

Inggris mulai semakin kuat, dengan motivasi utama untuk menguasai sumber daya mineral yang dapat ditambang dan posisi strategis Semenanjung Malaya.

Pada tahun 1880-an, Inggris secara bertahap memperluas kekuasaannya ke Pahang, sama seperti negara-negara Melayu lainnya di wilayah tersebut. Meskipun secara formal sultan tetap menjadi penguasa, dengan diperkenalkannya lembaga pejabat negara residen Inggris, kekuasaan sebenarnya berada di tangan administrasi kolonial Inggris. Pada tahun 1895, wilayah ini dimasukkan ke dalam persekutuan negara kolonial bernama Federated Malay States, di mana Pahang, bersama dengan Selangor, Perak, dan Negeri Sembilan, ikut serta dalam pemerintahan Inggris yang terpusat. Ini merupakan titik balik: otoritas Inggris memperkenalkan reformasi modernisasi, mendirikan pusat-pusat administrasi, sekolah, dan lembaga

kesehatan, dan negara ini mulai beroperasi semakin sesuai dengan prinsip-prinsip Barat.

Perkembangan ekonomi difokuskan pada pertambangan dan perkebunan. Komunitas Tionghoa memainkan peran terbesar dalam pertambangan timah, sementara tenaga kerja India direkrut secara massal untuk perkebunan karet. Hal ini menyebabkan transformasi etnis dan sosial: selain komunitas Melayu yang sebelumnya homogen, populasi Tionghoa dan India yang signifikan juga menetap di sana, yang mengubah struktur sosial dan keseimbangan kekuatan ekonomi Pahang. Hal ini tentu saja menyebabkan ketegangan etnis dan sosial, karena petani Melayu sering kali tersingkir dari para penerima manfaat pembangunan, sementara pemenang ekonomi kolonial adalah pemilik perkebunan Eropa dan pekerja asing.

Dasawarsa pertama abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan juga tantangan-tantangan baru. Di samping upaya modernisasi administrasi kolonial Inggris, kesadaran agama dan budaya masyarakat Melayu semakin menguat, yang menjadi cikal bakal gerakan nasionalisme kemerdekaan. Di bawah pengaruh gerakan reformasi Islam, isu-isu seperti kedaulatan masyarakat dan ketimpangan ekonomi semakin sering diangkat. Perang Dunia I hanya berdampak terbatas pada Pahang, tetapi permintaan perang telah meningkatkan produksi karet, misalnya. Perekonomian tumbuh secara spektakuler pada tahun 1920-an, tetapi selama Depresi Besar pada tahun 1930-an, jatuhnya pasar karet memiliki konsekuensi sosial yang parah di seluruh Malaysia. Pengangguran, penurunan upah, dan kemiskinan memperkuat ketidakpuasan sosial, terutama di kalangan pekerja Tionghoa dan India.

Selama Perang Dunia II, mulai Desember 1941, Pahang juga jatuh ke bawah pendudukan Jepang, sama seperti negara-negara Melayu lainnya. Jepang dengan cepat menghapuskan pemerintahan Inggris, dan kekuasaan Jepang menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi penduduk selama bertahun-tahun. Kekurangan pangan, kerja paksa, kekerasan militer yang tidak terkendali, dan krisis ekonomi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, perlawanan bersenjata juga terorganisir: Tentara Rakyat Melayu Anti-Jepang (Malayan People's Anti-Japanese Army - MPAJA), yang sebagian besar terdiri dari gerilyawan komunis yang dipimpin oleh orang Tionghoa, juga aktif di daerah hutan pedalaman Pahang dan terus-menerus menyerang pasukan Jepang. Hubungan penduduk Melayu sangat kompleks: sebagian dari mereka awalnya menyambut Jepang sebagai pembebas, tetapi yang lain segera merasakan kekejaman

pendudukan. Tahun-tahun perang meninggalkan luka yang dalam pada masyarakat Melayu setempat, tetapi juga berkontribusi pada melemahnya legitimasi kekuasaan Inggris.

Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah, Inggris kembali ke Pahang, tetapi tidak dengan ketentuan yang sama. Pemerintahan Inggris menjadi jauh lebih longgar, dan koloni-koloni di tanah Melayu terpaksa memberikan otonomi kepada Kerajaan Inggris yang sedang hancur. Pada tahun 1948, Federasi Melayu dibentuk, yang kemudian memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1957. Pengalaman perang, ketegangan antar komunitas etnis, dan kesulitan ekonomi bersama-sama menciptakan lingkungan politik yang melahirkan gerakan kemerdekaan Melayu. Dengan demikian, Pahang telah berkembang dari hubungan kerajaan internal pada abad ke-19 menjadi negara kolonial yang modern namun penuh ketegangan pada

pertengahan abad ke-20, yang secara langsung mempersiapkan kelahiran Malaysia yang merdeka. Mengenai sejarah pos dan filateli negara kecil Melayu, sejarah pos dan prangko Pahang tentu saja terkait erat dengan ekspansi kolonial Inggris dan integrasi administrasi negara-negara Melayu secara bertahap pada paruh kedua abad ke-19. Pada awal abad ini, Pahang belum memiliki layanan pos yang terorganisir: korespondensi antara keluarga penguasa lokal dan para pedagang dilakukan melalui kurir, pelaut, atau penyedia layanan pos dan logistik swasta. Namun, meningkatnya hubungan perdagangan - terutama pertambangan dan pemukiman komunitas Tionghoa - membuat pembangunan infrastruktur pos yang teratur menjadi semakin mendesak.

Pada tahun 1880-an, setelah Pahang berada di bawah perlindungan Inggris, kantor pos mulai dibuka di Kuantan, Pekan, dan pusat perdagangan penting

lainnya, dengan mencontoh jaringan pos Straits Settlements, sebuah unit administrasi kolonial Inggris. Pada periode awal, penggunaan sementara prangko negara tetangga - seperti Selangor atau Perak - yang dicap dengan tulisan "Pahang" merupakan hal yang umum. Perangko yang dicap ulang ini, yang pertama kali muncul dalam lalu lintas pos pada tahun 1889, saat ini sangat dicari oleh para filatelis karena jumlahnya yang terbatas dan telah menjadi simbol kedaulatan negara bagian.

Seri prangko pertama yang benar-benar diterbitkan oleh layanan pos negara bagian Melayu Pahang baru beredar pada tahun 1935, dan prangko dengan gambar yang sama, meskipun dengan denominasi dan warna yang berbeda, menampilkan potret sultan yang berkuasa, Abu Bakar.

Pada tahun 1936, seri prangko yang dihiasi potret Sultan Abu Bakar diperluas dengan nilai dan variasi warna baru. Seri prangko yang simbolis ini

tetap digunakan hingga tahun 1941, ketika Pahang bersama dengan negara-negara lain di Semenanjung Malaya jatuh ke tangan Jepang.

Setelah pendudukan Jepang berakhir dan pemerintahan Inggris kembali, Pahang menjadi bagian dari Federasi Malaya pada tahun 1948, dan sejak saat itu prangko kolonial Inggris mulai digunakan, dengan tulisan MALAYA - PAHANG tertera di atasnya. Pada tahun 1948, prangko kolonial yang memperingati pernikahan perak Raja Inggris George VI juga muncul di sini.

Bersamaan dengan itu, pada tahun 1950-an, prangko yang menggambarkan sultan setempat, Abu Bakar, juga muncul dan beredar dalam berbagai nilai dan warna.

Federasi Negara-Negara Melayu memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1957, kemudian pada tahun 1963 terbentuklah negara federal Malaysia yang kita kenal sekarang, di mana Pahang hingga

saat ini masih menjadi salah satu provinsi federal yang memiliki otonomi yang kuat.

SUMBER YANG DIGUNAKAN

Nigel Barley, *White Rajah. A Biography of Sir James Brooke*, London, Brown Book Group, 2002.

Adrian Bethray, *From Pirates to Philately - The Adventures of Collecting Sarawak*.

https://www.google.com/search?q=Adrian+Bethray%2C+From+Pirates+to+Philately+-+The+Adventures+of+Collecting+Sarawak.&og=Adrian+Bethray%2C+From+Pirates+to+Philately+-+The+Adventures+of+Collecting+Sarawak.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzY2M2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Richard Cavendish, *Birth of Sir James Brooke*, History Today. April 2003, Vol. 53, Issue 4.

W.R. Forrester-Wood, *The Stamps and Postal History of Sarawak*, Brighton, The Sarawak Specialists' Society, 1957.

G. E. Hansford-L.A. Noble, *Sarawak and Her Stamp. An Analytical Survey of all Issues from 1869 to 1934*, Isle of Wight, The Times Press, 1935.

Virginia Matheson Hooker, *A Short History of Malaysia: Linking East and West*, London, Allen & Unwin, 2003.

R. H. D. Lockhart, A Study of the Stamps of Sarawak, London, Offices of Stamp Collecting journal, 1920.

James Mackay, *Bélyegek és bélyeggyűjtés*, Budapest, Kossuth Kiadó, 2008.

Fred. J. Melville, *The Postage Stamps of Sarawak with a History of the Post Office from 1869-1906*, London, Nissen, 1907.

Anthony Millner, *The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Bertram W.H. Poole, *Sarawak, A Complete History of its Postage Stamps*, London, D. Field, 1906.

Edward W. Proud, *The Postal History of British Borneo*, Proud-Bailey, East Sussex, 1987.

Edward W. Proud, *The Postal History of Malaya Vol. 1 Straits Settlements*, Proud-Bailey, East Sussex, 2000.

Edward W. Proud, *The Postal History of Malaya Vol. 2 Federated Malay States*, Proud-Bailey, East Sussex, 2000.

Edward W. Proud, *The Postal History of Malaya Vol. 2 Unfederated Malay States (Johore, Kedah, Kelantan, Perlis and Trengganu)*, Proud-Bailey, East Sussex, 2000.

Cassandra Pybus, *The White Rajahs of Sarawak: Dynastic Intrigue and the Forgotten Canadian Heir*, Vancouver, Douglas & McIntyre, 1996.

Robert Reece, *The Name of Brooke. The End of White Rajah Rule in Sarawak*, Sarawak Literary Society, 1993.

Robert Reece, *Masa Japun. Sarawak under the Japanese, 1941-1945*, Sarawak Literary Society, 1998.

Robert Reece, *The White Rajahs of Sarawak. A Borneo Dynasty*, London, Archipelago Press, 2004.

Mike Thomson, *The Stabbed Governor of Sarawak*.
<https://www.bbc.com/news/magazine-17299633>

Barbara Watson Andaya–Leonard Andaya, *A History of Malaysia*, Honolulu, University of Hawaii Press, 2001.

Neville Watterson, *Sarawak, the De La Rue Story*,
London, Brock Publications, 2000.

James Brooke - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Brooke

Charles Brooke - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Brooke,_Rajah_of_Sarawak

Anthony Brooke - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Brooke

British Malaya - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Malaya

Postage stamps and postal history of Malaysia -
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamps_and_postal_history_of_Malaysia

Stamp Issuing Entities Of The World.

<https://www.linns.com/insights/stamp-issuing-entities-of-the-world.html>

Stanley Gibbons Commonwealth Stamp Catalogue: Brunei, Malaysia & Singapore, 5th Edition, London, Stanley Gibbons, 2018.

**PERANGKAT POS
PAJANG MALAYSIA
TERUTAMA DALAM
URUTAN WAKTU
1889–1941**



1889

Michel MY-PA 11



1889
Michel MY-PA 1II



1889
Michel MY-PA 2



1889
Michel MY-PA 3



1889
Michel MY-PA 4a



1889
Michel MY-PA 4b



1890
Michel MY-PA 1III



1890
Michel MY-PA 11V



1891

Michel MY-PA 41



1891
Michel MY-PA 411



1891
Michel MY-PA 4III



1891
Michel MY-PA 4IV



1891
Michel MY-PA 6



1893
Michel MY-PA 7



1895
Michel MY-PA 5



1895
Michel MY-PA 8



1897
Michel MY-PA 9



1897
Michel MY-PA Ia



1897
Michel MY-PA IIa



1897
Stanley Gibbons MY-PA 17



1897
Stanley Gibbons MY-PA 17a



1898
Michel MY-PA 10



1898

Michel MY-PA 11



1898
Michel MY-PA 12



1898
Michel MY-PA 13



1898
Michel MY-PA 14



1898
Michel MY-PA 15



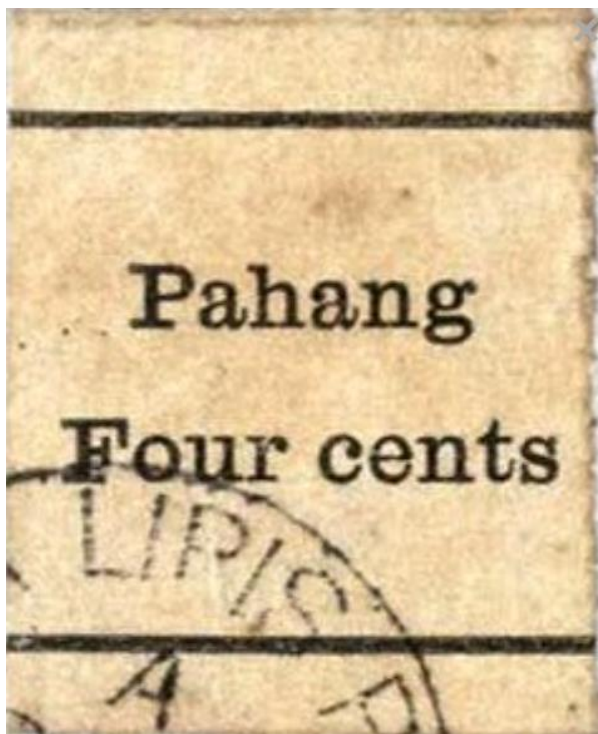
1899
Michel MY-PA 16



1899
Michel MY-PA 17

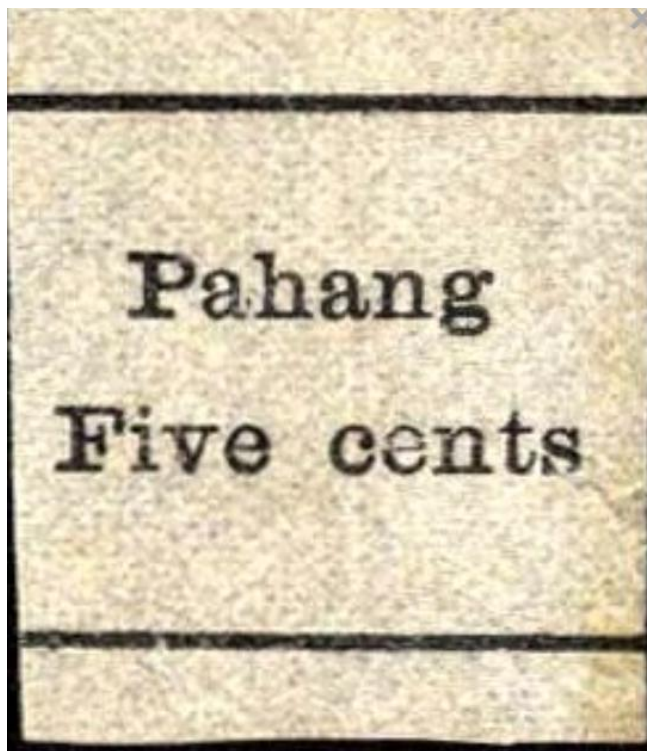


1899
Michel MY-PA 18



1899

Stanley Gibbons MY-PA 26



1899
Stanley Gibbons MY-PA 27



1935
Michel MY-PA 22



1935
Michel MY-PA 23



1935
Michel MY-PA 25



1935
Michel MY-PA 32



1936
Michel MY-PA 19



1936
Michel MY-PA 20



1936
Michel MY-PA 27



1936
Michel MY-PA 28



1936
Michel MY-PA 30



1936
Michel MY-PA 31



1936
Michel MY-PA 33



1936
Michel MY-PA 34



1936
Michel MY-PA 35



1936
Michel MY-PA 36



1937
Michel MY-PA 24



1941
Michel MY-PA 21



1941
Michel MY-PA 26



1941
Michel MY-PA 29

Collectively known as BRITISH MALAYA

NEGERI SEMBILAN	JOHOR	1824 Holland ceded MALACCA to British East India	1790 Kedah ceded PENANG to British East India	2 August 1824 SINGAPORE became a British Colony
PAHANG	KEDAH	1826 STRAITS SETTLEMENTS established under the control of the British East India Company		
PERAK	KELANTAN			
SELANGOR	PERLIS	1 April 1867 STRAITS SETTLEMENTS became a Crown Colony		
	TERENGGANU			
1895 Federated Malay States	Unfederated Malay States	30 October 1906 Labuan joined the STRAITS SETTLEMENTS		

Collectively known as BRITISH BORNEO

1846 Brunei ceded LABUAN to Britain	1882 SABAH governed by British North Borneo Company	1841 Brunei ceded SARAWAK to the White Rajah Dynasty of Sarawak
1848 LABUAN became a Crown Colony	1888 Sabah became British NORTH BORNEO protectorate	
1 January 1890 Labuan annexed to	NORTH BORNEO	

1 April 1946 Federated Malay States, Unfederated Malay States, Malacca and Penang formed the MALAYAN UNION	1 April 1946 Labuan annexed to Singapore, which be- came the CROWN COLONY OF SINGAPORE
31 January 1948 Reformed as the FEDERATION OF MALAYA (The Malay States became British Protectorates)	3 June 1959 SINGAPORE granted self-governance
(Malacca and Penang remained British Colonies)	15 July 1946 Labuan annexed to North Borneo, which became the CROWN COLONY OF BRITISH NORTH BORNEO
31 August 1957 The FEDERATION OF MALAYA granted independence within the British Commonwealth	August 1963 SINGAPORE declared independence
	31 August 1963 BRITISH NORTH BORNEO granted self-governance
	22 July 1963 SARAWAK granted self-governance

1 February 1974 KUALA LUMPUR Federal Territory ceded from Selangor	16 September 1963 The Federation of Malaya, Singapore, British North Borneo (as the State of Sabah) and Sarawak merge to form MALAYSIA	16 April 1984 LABUAN Federal Territory ceded from Sabah
1 February 2001 PUTRAJAYA Federal Territory ceded from Selangor	9 August 1965 SINGAPORE expelled from Malaysia	

